



SETAWAR ABDIMAS

Vol. 05 No. 02 (2026) pp.299-306

<http://jurnal.umb.ac.id/index.php/Setawar/index>

p-ISSN: 2809-5626 e-ISSN: 2809-5618

OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI LAYANAN JEMPUT BOLA AKTA KELAHIRAN DAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DESA NANGEWER KABUPATEN PURWAKARTA

Indri Putri Utami¹, Dini Fitriani², Tri Hadi Sulistyanto³, Tiara Arin Nurdiana⁴

^{1, 2, 3, 4} STIE Wibawa Karta Raharja, Indonesia

Email: ¹indri_putriutami@stie-wikara.ac.id

Abstrak

Keterbatasan akses informasi dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan masih menjadi permasalahan di Desa Nangewer, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat belum memiliki dokumen resmi seperti akta kelahiran dan identitas kependudukan digital. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publik sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah. Metode yang digunakan adalah pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui tahapan perencanaan, survei lapangan, koordinasi dengan perangkat desa, sosialisasi, pendampingan pengumpulan dokumen, pelaksanaan pelayanan, serta evaluasi kegiatan. Kegiatan dilaksanakan selama empat minggu dengan melibatkan mahasiswa KPPM, dosen pembimbing, perangkat desa, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program pelayanan publik berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan. Melalui kegiatan ini berhasil diterbitkan 245 akta kelahiran, 19 identitas kependudukan digital, 35 kartu keluarga, dan 45 KTP-el. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan pelayanan langsung kepada masyarakat efektif dalam mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Program ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sistem administrasi kependudukan di tingkat desa

Kata kunci : Administrasi Kependudukan; Pelayanan Publik; Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

Limited access to information and low public awareness regarding the importance of civil registration documents remain significant issues in Nangewer Village, Darangdan District, Purwakarta Regency. As a result, some residents still do not possess essential legal documents such as birth certificates and digital population identities. This community service activity aimed to optimize public service delivery while increasing community awareness of the importance of possessing valid civil registration documents. The method applied was the Participatory Rural Appraisal (PRA) approach, which emphasizes active community participation through several stages, including program planning, field surveys, coordination with village officials, socialization, assistance in document preparation, service implementation, and evaluation. The activity was conducted over four weeks involving community service students, supervising lecturers, village officials, and the Civil Registration and Population Office. The results indicate that the

program successfully improved community access to civil registration services. During the activity, 245 birth certificates, 19 digital population identities, 35 family cards, and 45 electronic identity cards (e-KTP) were successfully issued. These results demonstrate that direct service approaches at the village level can effectively accelerate administrative processes and increase public awareness regarding the importance of population documents. Furthermore, the program contributed to improving the quality of public services and strengthening the civil administration system at the village level

Keyword : Civil Registration; Public Service; Community Empowerment

PENDAHULUAN

Pelayanan publik yang efisien dan mudah diakses merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan identitas kependudukan digital (Erviana & Lestari, 2025). Dokumen-dokumen tersebut bukan sekadar administrasi formal, melainkan instrumen legal yang menentukan pengakuan negara terhadap status hukum seseorang. Akta kelahiran, misalnya, menjadi dasar untuk memperoleh berbagai hak sipil seperti pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga akses terhadap layanan perbankan. Tanpa dokumen tersebut, individu berisiko mengalami eksklusi sosial dan kesulitan dalam mengakses berbagai program pemerintah.

Dalam konteks transformasi digital, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mendorong implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari modernisasi administrasi kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ramadhani & Prakoso, 2025). Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses pelayanan, meminimalkan praktik birokrasi yang berbelit, serta mengurangi potensi kesalahan data akibat proses manual. Dengan sistem berbasis teknologi informasi, masyarakat dapat mengakses layanan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan, sehingga menghemat waktu dan biaya (Hanjani & Bedasari, 2025).

Namun demikian, efektivitas pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kompetensi perangkat, serta tingkat literasi digital masyarakat (Zein et al., 2025). Tantangan seperti keterbatasan infrastruktur jaringan, kesenjangan akses internet di wilayah terpencil, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur digital masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi yang masif, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan. Dengan pendekatan tersebut, pelayanan administrasi kependudukan diharapkan mampu mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan (Fikri & Tjenreng, 2025).

Di Desa Nangewer, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, masih terdapat kendala dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan. Hal itu disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan informasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen tersebut. Sehingga mengakibatkan banyak penduduk yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang sah, sehingga berpotensi menghambat akses mereka ke berbagai layanan publik lainnya. Data berikut ini menunjukkan masyarakat Desa Nangewer masih belum memiliki dokumen kependudukan yang sah.

Tabel 1. Data Dokumen Sah Desa Nangewer

Jenis Dokumen	Memiliki	Tidak Memiliki
Akta Kelahiran	1.773	400
KTP elektronik	4.920	91

**Sumber: Desa Nangewer, 2024*

Pada Tabel 1 nampak masih banyak masyarakat Desa Nangewer yang belum memiliki akta kelahiran maupun KTP elektronik (e-KTP). Dari observasi penulis, penyebab banyaknya masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran kebanyakan karena tidak mengetahui pentingnya akta kelahiran dan e-KTP serta manfaatnya, merasa repot mengumpulkan dokumen persyaratan pembuatan akta kelahiran dan e-KTP, pemikiran masyarakat bahwa pembuatan akta kelahiran maupun e-KTP tidak gratis, serta masyarakat merasa proses pembuatan akte kelahiran dan e-KTP rumit. Selain itu pelayanan publik di sektor administrasi kependudukan sering kali menghadapi masalah terkait manajemen data dan keterbatasan sumber daya manusia. Pengelolaan data administrasi kependudukan belum sepenuhnya profesional, hal ini dikarenakan jumlah aparat dan data kependudukan tidak seimbang (Fahlevi & Octaleny, 2024). Kondisi ini memperkuat urgensi pelaksanaan kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat di Desa Nangewer, di mana optimalisasi pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang lebih terstruktur dan sistematis menjadi sangat penting.

Kegiatan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (KPPM) ini dirancang untuk mengatasi masalah tersebut melalui serangkaian program kerja di bidang sosial yaitu kegiatan pelayanan publik yang terfokus pada pembuatan akta kelahiran dan e-KTP khususnya penerapan identitas kependudukan digital. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang sah, serta memfasilitasi proses pembuatan dokumen tersebut secara mudah dan cepat. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Nangewer dapat lebih memahami prosedur pengurusan dokumen kependudukan dan termotivasi untuk melengkapinya, sehingga hak-hak mereka sebagai masyarakat negara dapat terpenuhi secara optimal.

Berbagai kegiatan pengabdian mengenai administrasi kependudukan umumnya masih berfokus pada sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan atau pendampingan pengurusan dokumen secara terbatas. Sosialisasi menjadi salah satu metode yang dianggap efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan (Stiawan et al., 2024). Sebagian besar program belum mengintegrasikan edukasi masyarakat, pendampingan administrasi, serta pelayanan langsung yang melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam satu rangkaian kegiatan terpadu. Akibatnya, tingkat kepemilikan dokumen kependudukan belum meningkat secara optimal terutama pada masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan publik. Kebaruan kegiatan ini terletak pada penerapan model pelayanan terpadu berbasis Participatory Rural Appraisal (PRA) yang mengombinasikan identifikasi kebutuhan masyarakat, sosialisasi, pendampingan pengumpulan persyaratan, serta layanan jemput bola oleh Disdukcapil dalam satu kegiatan. Model tersebut tidak hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi juga menghasilkan luaran nyata berupa penerbitan dokumen kependudukan secara langsung.

Dalam kegiatan ini penulis memilih pendekatan berbasis komunitas dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan sangat efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat (Wirata et al., 2025). Melalui kegiatan PKM ini, masyarakat Desa Nangewer tidak hanya mendapatkan akses

lebih mudah ke layanan pembuatan akta kelahiran dan identitas kependudukan digital, tetapi juga didorong untuk lebih proaktif dalam mengurus dokumen-dokumen penting mereka.

Dengan demikian, optimalisasi pelayanan akta kelahiran dan penerapan identitas kependudukan digital di Desa Nangewer diharapkan dapat menjadi model yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah lain, serta memperkuat peran masyarakat dalam proses administrasi kependudukan

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Desa Nangewer dengan melibatkan Dosen Pembimbing, Mahasiswa KPPM (Kegiatan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat), Perangkat Desa, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) selama kurang lebih 4 minggu. Dalam kegiatan ini, mahasiswa/i KPPM bertugas memfasilitasi kebutuhan administrasi dalam bentuk penerbitan akta kelahiran, dan pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sehingga dengan adanya kegiatan di Desa Nangewer ini dapat mengoptimalkan pelayanan publik, memperkuat sistem administrasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan sipil yang tepat juga akurat. Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pelayanan publik yaitu :

1. Pelaksanaan program kerja kegiatan ini dimulai dengan tahap perencanaan yang matang bersama dosen pembimbing. Diskusi awal ini bertujuan untuk merumuskan strategi dan merencanakan langkah-langkah yang akan diambil dalam upaya optimalisasi pelayanan akta kelahiran dan penerapan identitas kependudukan digital di Desa Nangewer. Dalam diskusi ini, dipertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan masyarakat, kendala yang mungkin dihadapi, dan sumber daya yang tersedia, untuk memastikan bahwa program ini dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran.
2. Tahap selanjutnya melibatkan survei lapangan ke wilayah RW setempat di Desa Nangewer. Survei ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat terkait dengan akses dan pengurusan dokumen kependudukan. Pendekatan langsung dengan metode wawancara dan observasi digunakan untuk memperoleh data yang akurat tentang hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat, seperti kurangnya informasi, keterbatasan akses layanan, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan. Hasil survei ini menjadi dasar untuk merancang program kerja yang spesifik dan relevan dengan kondisi lokal.
3. Setelah pengumpulan data, diadakan diskusi lanjutan dengan perangkat desa untuk membahas temuan survei dan merencanakan tahapan-tahapan pelaksanaan program. Diskusi ini bertujuan untuk menyelaraskan tujuan program dengan kebutuhan masyarakat serta menentukan peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan kegiatan. Perangkat desa dilibatkan secara aktif dalam proses ini untuk memastikan dukungan penuh dan koordinasi yang efektif selama implementasi program.
4. Sosialisasi merupakan tahap krusial berikutnya. Perangkat desa bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai program pelayanan publik ini, termasuk jenis layanan yang akan disediakan, persyaratan yang harus dipenuhi, serta waktu dan tempat pelaksanaan.

5. Masyarakat diberi waktu satu minggu untuk mengumpulkan dan melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan akta kelahiran dan identitas kependudukan digital. Penentuan waktu ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi masyarakat dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan, sekaligus memastikan bahwa proses pelayanan nantinya dapat berlangsung secara efisien dan tertib.
6. Pada hari pelaksanaan, layanan publik diselenggarakan di lokasi yang telah ditentukan dengan melibatkan petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan ini dilakukan dengan pendekatan jemput bola, di mana petugas hadir langsung di tengah-tengah masyarakat untuk mempermudah akses dan mengurangi hambatan administratif. Pelayanan ini mencakup pengurusan akta kelahiran dan pendaftaran identitas kependudukan digital secara langsung. Perangkat desa juga disiapkan untuk membantu dan mengarahkan masyarakat selama proses pelayanan. Petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memberikan penyuluhan pentingnya kepemilikan dokumen sah dan manfaatnya untuk masyarakat.
7. Tahap akhir dari metode pelaksanaan ini adalah evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi ini melibatkan survei kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan program ke depannya dan memberikan pelatihan tambahan kepada perangkat desa untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan administrasi kependudukan.

Adapun indikator keberhasilan dari kegiatan ini Adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Indikator dan Target Pelaksanaan PKM

Indikator	Target
Kehadiran/partisipasi masyarakat	≥80%
Dokumen diterbitkan	Sesuai target (Akta kelahiran 400, e-KTP 91)
IKD berhasil diaktivasi	Meningkat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Nangewer dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan administratif yang mereka hadapi. Pendekatan ini dipadukan dengan kegiatan penyuluhan serta pendampingan langsung kepada warga untuk membantu menyelesaikan berbagai kendala terkait administrasi kependudukan. Pemilihan metode tersebut disesuaikan dengan tujuan kegiatan, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan, memfasilitasi perbaikan atau pengurusan dokumen yang diperlukan (Wirata et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pelayanan publik akta kelahiran dan identitas kependudukan digital di Desa Nangewer dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2024. Selama kegiatan ini, berhasil diterbitkan

245 akta kelahiran dan 19 identitas kependudukan digital. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Dokumen Sah Pelayanan Publik Tahun 2024

Jenis Dokumen	Jumlah
Akta Kelahiran	245
Identitas Kependudukan Digital (IKD)	19
Kartu Keluarga	35
KTP-el	45

Program berhasil menyelesaikan sekitar 61,25% kebutuhan penerbitan akta kelahiran masyarakat yang sebelumnya belum memiliki dokumen tersebut. Capaian ini menunjukkan efektivitas pendekatan jemput bola dalam meningkatkan akses pelayanan administrasi kependudukan. Sedangkan, untuk pembuatan KTP- el berhasil menyelesaikan 49,45% bagi Masyarakat yang sebelumnya belum memiliki dokumen tersebut. Kemudian terdapat 19 orang yang mengaktifasi IKD, sehingga target tercapai karena adanya peningkatan dari yang sebelumnya belum pernah ada yang aktivasi IKD di Desa Nangewer. Tercapainya penerbitan dokumen akta kelahiran dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga diikuti diterbitkannya Kartu Keluarga dan KTP-el. Masyarakat dan perangkat desa antusias mengikuti kegiatan ini, dengan tercapainya jumlah dan jenis dokumen yang diterbitkan pada tabel 3, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sesuai dengan tujuan kegiatan.



Gambar 1: Pelaksanaan Pembuatan Akta dan IKD

Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan memberikan dampak terhadap meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan administrasi lainnya. Selain itu, keterlibatan aktif perangkat desa meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pelayanan administrasi. Temuan ini sejalan dengan (Ikhsan & Amrina, 2024) yang menyatakan bahwa pelayanan administrasi berbasis digital mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun demikian, pada kegiatan ini terdapat nilai tambah berupa pendampingan administrasi sebelum pelayanan berlangsung sehingga tingkat keberhasilan penerbitan dokumen menjadi lebih tinggi.

Selama pelaksanaan, tantangan utama yang dihadapi termasuk masalah teknis. Solusi yang diterapkan, seperti perbaikan sistem pendaftaran digital, mengatasi masalah ini dengan

efektif. Ini sejalan dengan solusi menyarankan bahwa investasi dalam teknologi dan pelatihan dapat memperbaiki efisiensi layanan publik (Ikhsan & Amrina, 2024). Penerapan dokumen kependudukan resmi memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk memudahkan akses layanan sosial dan bantuan pemerintah. Hal ini yang mengungkapkan bahwa dokumen kependudukan resmi berkontribusi pada peningkatan akses layanan dan bantuan, serta meningkatkan inklusi sosial (Ikhsan & Amrina, 2024)

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian melalui pelayanan administrasi kependudukan berbasis layanan jemput bola berhasil meningkatkan akses masyarakat Desa Nangewer terhadap dokumen kependudukan. Program menghasilkan penerbitan 245 akta kelahiran, 45 KTP-el, 35 kartu keluarga, dan 19 Identitas Kependudukan Digital. Pendekatan Participatory Rural Appraisal yang dipadukan dengan pendampingan administrasi terbukti efektif meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa. Kegiatan pengabdian dan pemberdayaan kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Nangewer berhasil mencapai tujuan utama, yaitu kegiatan pelayanan publik untuk penerbitan akta kelahiran dan identitas kependudukan digital di Desa Nangewer berhasil mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan kependudukan telah berhasil mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen resmi

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakartayang telah membantu selama proses kegiatan ini. Terima kasih juga kepada perangkat Desa Nangewer yang telah menyediakan fasilitas dan sumber daya yang diperlukan

DAFTAR PUSTAKA

- Avianti, W. & Utami, I. P. (2025). Pengembangan Produk Kerajinan Tangan Berbasis Bambu untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Capacitarea: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 20-25. <https://doi.org/10.35814/capacitarea.2025.003>
- Erviana, D., & Lestari, Y. (2025). Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital (Studi tentang Pemanfaatan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Inovant*, 3(4), 250-265. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/41877/13737>
- Fahlevi, A. R., & Octaleny, E. (2024). Digitalisasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang. *Lentera Jurnal Manajemen*, 2(1), 14-26. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47280/pemerintah-kebut-digitalisasi-layanan->
- Fikri, M. A. R., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Manajemen Pelayanan Publik. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 291-304. <https://doi.org/10.37481>
- Hanjani, N. A., & Bedasari, H. (2025). Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Pekanbaru. *Niara*, 18(1), 58-78. <https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.25325>

- Hariani, D., Utami, I. P., Rahardian, W., & Rahmانيyah, N. (2024). Training on Product Development and Branding Strategy for Kampung Mandiri Susu Sapi Perah. *ABDI DOSEN*, 8(4), 1651-1658. <https://doi.org/10.32832/abdidos.v8i4.2513>
- Ikhsan, M. A., & Amrina, E. (2024). Penerapan Lean Service Pada Proses Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran (Studi Kasus: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota X). *Jurnal Inovasi Dan Manajemen Bisnis*, 6(2), 34–57. <https://journalversa.com/s/index.php/jimb>
- Ramadhani, K. P. D., & Prakoso, C. T. (2025). Difusi Inovasi Aplikasi IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. 6(3). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i3>
- Stiawan, A., Yudha, R. K., & Jumri, R. (2024). Sosialisasi Dalam Pencegahan Bullying di Kalangan Siswa SMP di SMP 14 Seluma. *Journal of Human And Education*, 4(6), 228–237.
- Sulistyanto, T. H., Utami, I. P., Suryana, S., & Rachmawati, S. (2025). Building Opportunities and Organizational Strength for SMEs Transformation (BOOST): A Community Service Model for Cooperative Development in Jatisari, Bekasi Using the AHP Method. *Jurnal Sentra Pengabdian*, 1(7), 27-38. <https://doi.org/10.33867/JSP.608>
- Utami, I. P., Puspasari, D., Izzati, N., & Fitriani, D. (2025). Penerapan Pemasaran Digital Pada UMKM Cireng Gonjreng Di Desa Sukajaya. *Maslahah Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 143-156. <https://doi.org/10.56114/maslahah.v6i2.12388>
- Wirata, G., Pamungkas, T. H., Sulandari, S., Putera, P. D. P. M., & Indrayana, C. P. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Banjar Gemeh melalui Sosialisasi dan Pendampingan Administrasi Kependudukan, Jaminan Sosial, dan Layanan Pos Pengaduan. *JCRE: Journal of Community Research and Engagement*, 2(2), 102–111. <https://doi.org/10.60023/f730w931>
- Zein, A. W., Fayyaza, A., & Sipahutar, I. A. (2025). Efektivitas Pengeluaran Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Era Digital. *Jurnal Manajemen Bisnis Era Digital*, 2(2), 138–149. <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v2i2.524>